

## ABSTRAK

**(Solikin Ramadhan)** *Implementasi Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus : Pilkades Pawalutan di Masa Covid - 19)*, Skripsi, Pembimbing: Drs. M. Ilham Masykurie Hamdie, M. Ag. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, (2023)

### **Kata Kunci : Implementasi, Pemilihan Kepala Desa dan Covid-19**

Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara No 9 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagai dasar desa Pawalutan dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang mana situasi tersebut berada pada masa pandemi Covid-19 sehingga mengalami penyesuaian dalam proses Pilkades. Penyelenggaraan Pilkades di situasi pandemi juga rentan menjadi klaster baru Covid - 19. Selain itu, penyelenggaraan Pilkades ini tidak terlepas dari kendala dalam penyelenggaraanya yang mana Pilkades kali ini penyelenggaraanya berbeda dengan yang telah lalu.

Berdasarkan tujuan penelitian: 1) Mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Pawalutan Kecamatan Banjarang Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2021 di masa Covid 19. 2) Mengetahui faktor-faktor kendala yang mempengaruhi Pemilihan Kepala di Desa Pawalutan di masa Covid 19. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum empiris dengan pendekatan metode deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik Pengolahan data ialah dengan editing, deskripsi dan penarikan kesimpulan. Analisis data mengguna analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian Impelentasi Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Kepala Desa di Desa Pawalutan Kecamatan Banjarang Kabupaten Hulu Sungai Utara di masa Covid-19 masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. Hal ini dibuktikan dengan masih terdapat masyarakat yang kurang mematuhi protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker di tempat pemungutan suara. Adapun faktor-faktor kendala yang mempengaruhi pelaksanaan Pilkades di Desa Pawalutan yaitu adanya Covid-19 yakni kurangnya kepatuhan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan, letak geografis yakni adanya jarak antar RT karena desa Transmigrasi, juga kesadaran partisipasi masyarakat untuk memberikan hak pilihnya kurang maksimal yakni masih terdapat masyarakat yang tidak memberikan hak suaranya.